

**ANALISIS YURIDIS ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
SANKSI TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IRLYNA DATU LEKSONO

NIM 145010101111026



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
SANKSI TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Oleh:

**IRLYNA DATU LEKSONO
NIM. 145010101111026**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

NIP. 19550212 198503 1 003

Mufatikhatul Farikhah, SH., MH

NIP. 19840816 201504 2 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, SH., L.L.M

NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si

NIP. 19620805 198802 1 001

IDENTITAS PENGUJI

Ketua Majelis : Dr. Ismail Navianto, SH., MH.

NIP : 19550212 198503 1 003

Bagian : Hukum Pidana

Sekretaris Majelis : Dr. Lucky Endrawati, SH.,MH.

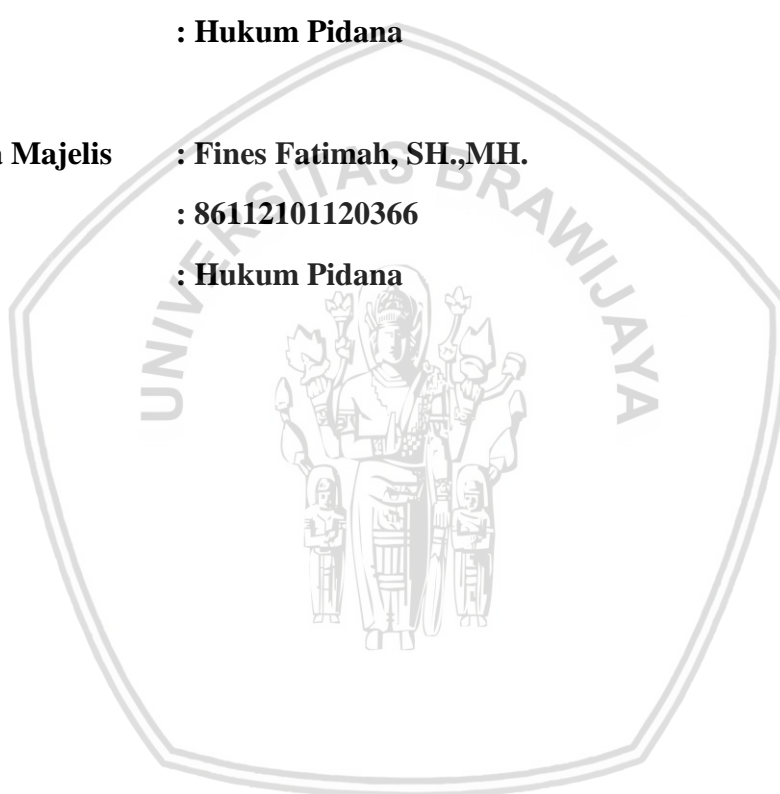
NIP : 197503161998022001

Bagian : Hukum Pidana

Anggota Majelis : Fines Fatimah, SH.,MH.

NIP : 86112101120366

Bagian : Hukum Pidana





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 732/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : IRLYNA DATU LEKSONO
NIM : 145010101111026
Judul : ANALISIS YURIDIS ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
SANKSI TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Agustus 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB


Dr. Trija Djatnika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Iryna Datu Leksono
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 06-Maret-1996
4. Status : Belum Kawin
5. Alamat : Kp.Banjara Pucung RT.02/RW.10 No.68
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nomor Handphone : 081288839514
9. Email : irlynad@gmail.com

Pendidikan :

1. SD Yaspen Tugu Ibu Depok 2002-2008
2. SMP Bintara Depok 2008-2011
3. SMA Plus PGRI Cibinong 2011-2014
4. Universitas Brawijaya Malang (Fakultas Hukum) 2014-2018

Hormat Saya

IRLYNA DATU LEKSONO

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan tuntunan-Nya tiada henti hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik materiil maupun moril, berkat bantuannya segala kendala dapat penulis atasi.

Dengan rasa hormat, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua dan kakak penulis yang tidak pernah lelah mendengarkan curahan hati penulis, memberikan doa, semangat, motivasi, nasehat, serta dukungan moril dan materiil kepada penulis.
2. Bapak Dr. Rahmad Syafaat, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Yuliati, SH., L.LM, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Dr. Ismail Navianto, SH., MH., selaku dosen pembimbing utama yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan saran, serta membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Mufatikhatul Farikhah, SH., MH., selaku dosen pembimbing pendamping yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan, membantu, mengingatkan, selalu sabar, memberikan saran, mendengarkan keluh kesah penulis dan membimbing penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis guna memperbaiki skripsi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya Dosen-Dosen Konsentrasi Hukum Pidana yang telah membagi ilmu, arahan, dan pengetahuan yang bermanfaat serta kepada penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi penulis.
9. Bapak H.Sumedi Djojotomo berserta keluarga yang telah membantu penulis dalam perkuliahan serta memberikan dukungan kepada penulis.

10. Pakde Rusianto dan Bude Sri berserta keluarga yang telah membantu dukungan kepada penulis serta selalu memberikan motivasi yang sangat baik.
11. Sahabat seperjuangan yang selalu mendengar keluh kesah penulis, Arintya Yogantari Mulyoto, Nadya Charisty Wijanarko, Febriani Tri Putri, , Irene Fransisca Liemanto, Sayyidatun Nashuha Basyar, Ariani Rizka Putri, yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, semangat, doa, menenangkan dalam segala situasi, dan selalu sabar menghadapi penulis saat penulis membutuhkan.
12. Sahabat penulis semasa SMA, Eva Asyova Walmarwah, Dea Apriliani
13. Artis terbaik penulis Kak Temmy Rahadi yang selalu kasih support dan doa kepada penulis
14. Keluarga Besar KKN Kelompok 16 Sumberkajar, Gunung Kawi
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, khususnya teman-teman seperjuangan Skripsi dan Teman HIMAKOPI, yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Terima kasih banyak atas semua bantuan, dukungan ataupun motivasi yang telah diberikan pada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum.

Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya, saran serta kritik diperlukan sehingga dapat menambah khasanah keilmuan dan menjadi bahan diskusi yang sangat akademis.

Malang, Agustus 2018

Penulis,

Irlyna Datu Leksono

**ANALISIS YURIDIS ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK SEBAGAI
SANKSI TINDAKAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

**Irlyna Datu Leksono, Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H, Mufatikhatul
Farikhah, S.H.,M.H**

Jurusan Ilmu Hukum, F. Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: irlynad@gmail.com

ABSTRAK

Judul ini diambil terkait dengan pengaturan alat pendeteksi elektronik sebagai sanksi tindakan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Ada beberapa masalah penelitian yang disajikan: 1. Bagaimanakah pengaturan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak? 2. Bagaimanakah pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak dimasa yang akan datang?

Penulis menggunakan metode yuridis normatif bersama dengan pendekatan undang-undang, sedangkan bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diikuti oleh teknik penelusuran bahan hukum yaitu studi kepustakaan, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan seksual terhadap anak menjadi keadaan yang darurat saat ini maka perlu adanya pengaturan alat pendeteksi elektronik di Indonesia dalam undang-undang serta tindakan tersebut belum sempurna seyogyanya perlu adanya kebijakan yang tegas pada peraturan pemberian tindakan kebiri serta pemasangan alat pendeteksi elektronik yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Tindakan, Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak.



DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vii |
| RINGKASAN | viii |
| SUMMARY | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan Penelitian | 15 |
| D. Manfaat Penelitian | 16 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 17 |
| 2. Manfaat Praktis | 17 |
| E. Sistematika Penulisan | 18 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Anak | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak | 24 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana..... | 27 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindakan Dalam Undang Undang Perlindungan Anak | 30 |
| E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual | 34 |
| F. Tinjauan Umum Tentang Teori Pemidanaan | 37 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Sumber Bahan Hukum | 42 |
| D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum | 44 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 45 |
| F. Definisi Konseptual | 45 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pengaturan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang | 47 |
| B. Pengaturan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Yang Tepat Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Masa Yang Akan Datang | 80 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran | 91 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
|----------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Pemerkosaan | 5 |
| Tabel 2. Data Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Pencabulan | 6 |
| Tabel 3. Penelitianan Terdahulu | 14 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk
Kepentingan Akademisi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Bebas Plagiasi
- Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan serta peranan, yang menyadari betul mengenai pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika anak-anak telah matang usia serta pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka akan tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu. Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial¹.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Dalam hal perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat dan mencerminkan suatu usaha yang

¹Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.33

efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dalam hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Dalam konsideran UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha, dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, karena adanya golongan

anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang *responsive* terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi. Melalui UU Perlindungan Anak tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak². Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya dilapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara itu, definisi anak pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), yakni³ :Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Salah satu orang diantara para aktivis perempuan merupakan Eglantyne Jebb, yang kemudian mengembangkan butir-butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi menjadi *Save the Children Fund International Union*, yang

²M.Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Di Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 9.

³ Konvensi PBB tentang Hak Anak:

“Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”

antara lain berupa⁴, anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan ras, kebangsaan, dan kepercayaan serta anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah, serta harus mendapat perlindungan dari segala bentuk eksploitasi. Sedangkan dalam, UU Perlindungan Anak pasal 1 Angka 1 memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta dengan pemenuhan hak anak⁵. Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*)⁶.

Sementara itu, Peter Newel seorang *expert* dalam perlindungan anak, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, yaitu biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat

⁴Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm 29.

⁵Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 30-41.

tinggi. Jauh lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selalu terjadi dari tahun ke tahun, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan, selalu terjadi disetiap tahun selama 5(lima) tahun terakhir⁷ yaitu

Tabel 1.

Data Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Pemerkosaan

| Tahun | Jumlah Korban |
|-------|---------------|
| 2013 | 343 anak |
| 2014 | 656 anak |
| 2015 | 218 anak |
| 2016 | 120 anak |
| 2017 | 116 anak |

Sumber bahan hukum sekunder, diolah dari bahan KPAI tahun 2018. Tabel diatas menunjukkan jumlah kekerasan seksual dalam hal tindak pidana pemerkosaan yang memang dari tahun ke tahun sudah menurun namun jumlahnya masih cukup besar.

⁷KPAI,2017, *Bank Data Perlindungan Anak*(online), <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2017> (16 Maret 2018)

Tabel 2.

Data Kekerasan Yang Terjadi Pada Anak Pencabulan

| Tahun | Jumlah |
|-------|--------|
| 2013 | 343 |
| 2014 | 656 |
| 2015 | 218 |
| 2016 | 156 |
| 2017 | 140 |

Sumber bahan hukum sekunder, diolah dari bahan KPAI tahun 2018. Tabel diatas menunjukkan jumlah kekerasan seksual dalam hal tindak pidana pencabulan yang memang dari tahun ke tahun sudah menurun namun jumlahnya masih cukup besar⁸.

Meskipun mengalami penurunan terhadap sejumlah anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat perkembangan cara untuk melakukan (*modus operandi*) dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual menjadi beragam hingga dapat terjadi pembunuhan. Menurut sekretaris KPAI Rita Pranawati, modus dalam pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak semakin beragam, dan terjadi karena cara asuh yang salah, sehingga peluang pelaku kejahatan semakin lebar, serta kemajuan teknologi dan lingkungan pergaulan dalam menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak⁹.

⁸Kemenpppa, 2017, **Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak** (Online), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/1260/data-pengaduan-komisi-perlindungan-anak>, (19 April 2018)

⁹Dedi Hendrian, 2016, **KPAI : Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100%** (online), <http://kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, (20 Maret 2018)

Anaka di Indonesia yang telah menjadi korban kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya, hukuman yang sebelumnya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, karena dinilai hukuman penjara dengan minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dianggap sebagai sanksi pidana ringan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak¹⁰. Hal ini menjadikan kekerasan seksual terhadap anak menjadi kejahatan luar biasa, sehingga Presiden Negara Republik Indonesia telah menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak adalah menjadi keadaan darurat, sehingga Presiden Negara Republik Indonesia yang kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang terdapat tindakan kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak.

Adapun kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Indonesia yang pertama kasus seorang residivis. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 terjadinya tindak pidana kasus seorang residivis (pengulangan suatu tindak pidana) melakukan kekerasan seksual pada anak, berinisial RJ alias Muksin alias Tebok 44 tahun. RJ yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 5 (lima) anak, termasuk anak kandungnya sendiri berusia 10 (sepuluh) tahun, dan ini adalah kali kedua RJ telah melakukan hal tersebut, yang pertama adalah satu orang anak menjadi korban, RJ mengakui bahwa dirinya tidak tahu mengapa melakukan hal tersebut, dan pelampiasan nafsu tersebut adalah karena ditinggal sang istri berkerja di

¹⁰Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Malaysia sejak tahun 2009 yang lalu, sehingga RJ harus menjalani sanksi pidana 4 tahun 9 bulan lalu bebas, dan saat ini merupakan perbuatan RJ kedua yang dilakukan sehingga karena perbuatan tersebut, RJ dijerat Pasal 76D dan Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berupa sebuah ancaman sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara¹¹. Dalam kasus yang kedua tersebut adalah pengulangan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang usianya masih belum dewasa, karena tidak ada peraturan untuk memberikan efek jera pada pelaku sehingga terjadi pengulangan tindak pidana dikemudian hari.

Tindakan alat pendeteksi elektronik yang terdapat pada pasal 81 ayat (7)¹². Tindakan alat pendeteksi elektronik yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak dengan cara mengancam anak, memaksa anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan dirinya atau dengan orang lain¹³. Dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku residivis kekerasan seksual adalah selama 2 (dua) tahun untuk waktu paling lama dan dilaksanakan setelah pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan seksual pada anak menjalani pidana pokok yang sebagaimana telah ditetapkan oleh hakim di

¹¹Karnia Septia, 2016, *Cabuli 5 Anak Dibawah Umur, Residivis Kasus Paedofil* (online), <https://regional.kompas.com/read/2016/02/24/12592311/Cabuli.5.Anak.di.Bawah.Umur.Residivis.Kasus.Paedofilia.Kembali.Dibekuk> (20 Maret 2018)

¹²Pasal 81 ayat (7)

¹³Pasal 76D

pengadilan¹⁴. Pemberian tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku sesuai undang-undang yang telah dicantumkan yaitu sebagai tambahan dari kebiri kimia serta rehabilitasi, sedangkan pemberian kebiri kimia juga disertai dengan rehabilitasi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak¹⁵.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di tanda tangani oleh Presiden Negara Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2016¹⁶. dalam hal tersebut memuat tentang aturan tindakan kebiri kimia bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, hukuman mati, dan juga pemasangan *chip* elektronik bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak¹⁷.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana yang tidak berat dan masih banyak terjadi kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan masih terjadi pengulangan tindak pidana oleh

¹⁴Pasal 81 ayat (7)

¹⁵Pasal 81 ayat (3)

¹⁶Aditya Budiman, 2016, *Presiden Jokowi Teken Perpu Kebiri* (online), <http://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/0603774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri> (20 Maret 2018)

¹⁷Nabila Tashandra, 2016, *DPR Sahkan Perppu Kebiri Menjadi Undang Undang* (online), <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang-undang>, (20 Maret 2018)

pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak (residivis).

Dalam Pasal 81 ayat (7) tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik pemerintah akan memasang alat pendeteksi elektronik berupa chip terhadap pelaku kekerasan seksual, ada dua opsi untuk pemasangan alat pendeteksi ini. Pertama alat pendeteksi akan ditanam dan kedua alat pendeteksi akan dipasang pada gelang yang wajib dipakai pada pelaku kekerasan seksual, hal ini merupakan sanksi tindakan yang dikumulasikan dengan tindak pidana penambahan hukuman berupa kebiri kimia dan rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak semua bisa dilakukan kepada semua pelaku¹⁸. Pelaku kekerasan seksual yang melakukan tindak pidana hanya yang termuat dengan klarifikasi tertentu untuk menjalani hukuman pemasangan alat pendeteksi elektronik yang pertama pelaku yang berstatus residivis pemerkosa dan pencabulan anak, dan yang kedua adalah kondisi korban pasca kejadian perkosaan, diantaranya korban lebih dari satu, mengalami luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular, fungsi reproduksinya terganggu atau hilang, atau korban meninggal dunia.

Pemberian tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik terdapat pro dan kontra menyangkut akibat yang dapat timbul terhadap pelaku serta dampak pemberian tindakan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik pada pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak

¹⁸Pasal 81 ayat (7)

akan mengakibatkan otak manusia mengecil, tulang manusia keropos, sel darah merah akan terus berkurang dan hilang fungsi kognitif pada otak atau kecerdasan, pola berpikir manusia, ketajaman analisa manusia dan cara kemampuan berpikir pada otak manusia terganggu. Ketua MKEK, dr. Prijo Sidipratomo menyatakan bahwa apabila ada dokter di Indonesia yang melakukan eksekusi pemasangan alat pendeteksi elektronik yang akan tetapi tidak ada atas persetujuan hakim yang diberikan kepada pelaku kekerasan atau kejahatan seksual anak maka akan diberikan sanksi yaitu dikeluarkan dari profesi dokter Indonesia karena tidak ada yang mempengaruhi sumpah dokter Indonesia dan sumpah dokter adalah tidak dapat menggunakan pengetahuan sebagai dokter untuk suatu hal atau perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kemanusiaan¹⁹.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui pro dan kontra ini terjadi karena penerapan dalam Undang-Undang terkait tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan merupakan sanksi tindakan yang harus diberikan. Penulis mencoba menganalisis terhadap tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang digunakan untuk mencegah pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

¹⁹Nusantaranews,2016, *Hukuman Kebiri Melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia* (online), <https://nusantaranews.co/hukuman-kebiri-melanggar-sumpah-dokter-dan-kode-etik-kedokteran-indonesia/>, (22 Maret 2018)

Tabel 3. Orisinalitas Penelitian

| No | Tahun Penelitian | Nama Peneliti Dan Asal Instansi | Judul Penelitian | Rumusan Masalah | Keterangan |
|----|---------------------|---|---|--|--|
| 1. | 2017 | Fitria Nur Yuliana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta | Tindakan Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Undang Undang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Di Indonesia | 1.Bagaimana tindakan kebiri serta pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam UU Perlindungan Anak Di Indonesia? | Perbedaan penulisan yang ditulis oleh penulis dengan skripsi disamping adalah menganalisis tentang kesesuaian tentang pengaturan sistem pemidanaan di Indonesia serta tindakan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap |

| | | | | | |
|----|------|--|---|--|--|
| 2. | 2017 | Musyafa Abdul Munim Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Malang | Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual | 1. Bagaimanakah pandangan MUI terhadap hukuman pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia? | anak yang mencerminkan hak anak. Perbedaan penulisan yang ditulis oleh penulis dengan skripsi disamping adalah untuk mengetahui pandangan MUI terhadap pasal 81 UU No.17 2016 tentang perlindungan anak serta mengetahui pandangan terhadap kekerasan seksual |
|----|------|--|---|--|--|

Demikian adalah perbandingan table dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan perbedaan meskipun ada kesamaan tema dengan penelitian terdahulu yaitu penerapan pemberian pidana kebiri kimia bagi pelaku yang melakukan tindak pidana berupa kekerasan seksual pada anak, namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini mengkaji tentang perbedaan penulisan yang ditulis oleh penulis dengan skripsi disamping adalah menganalisis tentang penerapan tindakan kebiri kimia serta sanksi kekerasan seksual yang diberikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan cara pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Meskipun aturan pemberian pidana kebiri kimia bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual telah mengalami *pro* dan *kontra* di Negara Republik Indonesia, namun hak anak yang telah menjadi korban harus ditegaskan dan dipertahankan serta menjadikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik sebagai efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, agar tidak terjadi pengulangan pidana dikemudian hari atau dapat menimbulkan pelaku baru di masa mendatang dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan menjunjung tinggi hak seseorang anak sebagai manusia untuk melanjutkan atau mendapatkan suatu perlindungan hukum dan dapat menjalankan kehidupan yang normal dan juga berkembang secara wajar sesuai dengan usia anak tanpa beban psikologis atau trauma terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian penulis dengan judul, latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan sanksi yang tegas yang dikeluarkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
2. Untuk mengetahui kesesuaian pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan adanya sistem pemidanaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun orang lain. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya bagi keilmuan di Indonesia di dalam bidang hukum pidana materiil, bidang hukum perlindungan anak, dan mengenai pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang mencerminkan perlindungan terhadap hak anak.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu gambaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang mencerminkan perlindungan terhadap hak anak, serta mengetahui tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat diterapkan di Negara Republik Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Sebagai peningkatan kecerdasan intelektual dan peningkatan kompetensi mahasiswa terkait dengan pengalaman mengetahui pengaturan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual

terhadap anak di Indonesia yang mencerminkan perlindungan terhadap hak anak, serta mengetahui sistem pemidanaan yang sudah tercantum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia .

B. Bagi Akademisi

Sebagai bahan tambahan alternatif, tambahan referensi materi perkuliahan serta untuk penyempurnaan kurikulum dalam pembelajaran agar lebih efektif dan lebih efisien.

C. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi dan untuk menambah pengetahuan mengenai tindakan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta mengetahui pengaturan pemasangan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia yang mencerminkan perlindungan terhadap hak anak, serta dapat mencegah seseorang untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena sanksi pidana yang lebih berat.

D. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai acuan untuk mempertegas peraturan perundang-undangan dan mencegah para pelaku di

Indonesia untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan dengan memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas. Secara sistematis penulisan metode penelitian penulisan hukum adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, diuraikan tinjauan umum mengenai pengertian dan teori yang menguraikan mengenai tindak pidana kebiri sebagai sanksi yang diberikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III, menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV, dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil yang diteliti oleh penulis skripsi.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V, kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang umumnya terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak¹. Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiaannya

¹ Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5

menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dan Filipina umur antara 7-16 tahun². Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA. Dalam Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

² Paulus Hadisuprpto, **Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggualangannya**, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.8

tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

4. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker³. Beberapa unsur kata Perlindungan :

1. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
2. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
3. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
4. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
6. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
7. Melindungi: membuat diri terlindungi.

³ W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 345.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengkualifikasi peristiwa atau kenyataan tertentu menjadi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Sedangkan negara hukum yaitu negara yang berdasarkan negara hukum dan yang menjamin keadilan bagi warganya⁴.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

⁴C.S.T. Kansil, S.H, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 110.

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut⁵.

Wahid dan Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian⁶

Kekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman, paksaan atau tidak berdayanya seorang anak dalam aktivitas seksual meliputi tekanan pencabulan dan juga perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Sehingga dalam hal ini anak menjadi korban dalam kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa dan menyebabkan anak merasakan trauma dan gangguan psikologisnya⁷. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual,

⁵Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia**, Nuansa, Jakarta 2008, Hlm 35.

⁶Wahid, dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 41.

⁷Ismantoro Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah *incest*, dan sodomi⁸.

Pelecehan seksual dan kekerasan seksual atau perkosaan adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindakan perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam: mulai dari sekedar menyuiti perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan⁹.

Pada awal mulanya, istilah tindak kekerasan pada anak *child abuse* berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran. Pada tahun 1946, Caffey, seorang radiologist, melaporkan kasus cedera yang berupa gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk pada anak atau bayi disertai perdarahan subdural tanpa mengetahui sebabnya¹⁰. Kekerasan terhadap anak *child abuse* adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Contoh paling jelas tindakan kekerasan yang dialami anak-anak adalah

⁸Depkes RI, **Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 78.

⁹Suyanto, **Masalah Sosial Anak**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 24.

¹⁰*Ibid* hlm 25.

pemukulan atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai terjadi luka atau goresan. Namun demikian, perlu disadari bahwa child abuse sebenarnya tidak hanya berupa pemukulan atau penyerangan secara fisik, melainkan juga bisa berupa berbagai bentuk eksploitasi melalui misalnya pornografi dan penyerangan seksual *sexual assault*, pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau makanan kurang gizi, pengabaian pendidikan dan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan medis *medical abuse*¹¹.

Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau berbicara masalah kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus perkosaan banyak yang lolos dari tuntutan hanya karena “korban dituduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu.”

Seringkali ada anggapan seseorang dengan orang lain itu berbeda dalam mengartikan suatu tindakan pelecehan seksual itu termasuk dilakukan “suka sama suka atau tidak”, “memaksa atau tidak”, “mengancam atau tidak”. Ironisnya dalam hal ini adalah sering kali suatu tindakan yang menurut definisi di atas termasuk „tindakan kekerasan“ namun masyarakat atau bahkan perempuan sendiri tidak merasa yang dirinya mengalami tindak kekerasan

¹¹*Ibid* hlm 26.

seksual, misalnya perkosaan dalam perkawinan *marital rape*, perkosaan saat kencan *dating rape*, perkosaan karena dieksploitasi *exploitation rape*, dan sebagainya¹².

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindakan Dalam Hukum Pidana

Hukum pidana di Indonesia memiliki dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana (punishment) didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan orang yang tidak melakukan pidana. Herbert L. Packer menyatakan bahwa sanksi pidana sebagai :

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime”¹³.

Berdasarkan pengertian tersebut, sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (tindak pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu. Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana

¹²*Ibid* hlm 35.

¹³Mahrus Ali SH.,MH, **Dasar Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta,2010,hlm 251.

kurungan, dan pidana denda sedangkan pidana tambahan hanya diberikan jika pidana pokok tersebut dijatuhkan.

Sanksi tindakan dalam KUHP memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. (Pasal 44 ayat (2) KUHP)

2. Bagi anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa: (Pasal 45 KUHP)

- a. Mengembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, atau;
- b. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah
- c. Dalam hal ini yang ke-2, anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan Negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa
- d. Penempatan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan asosial.

Jenis-jenis tersebut berlaku juga bagi delik-delik yang tercantum dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan perundang-undangan itu menyimpang.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan, pertama sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut, jika fokus

sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus saksi tindakan terarah pada upaya pemberian pertolongan agar pelaku berubah¹⁴. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar, sedangkan sanksi tindakan, menurut Sudarto bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelangar¹⁵. Kedua, dilihat dari tujuannya sanksi pidana bertujuan member penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, dan merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Ketiga, ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingannya. Keempat, perbedaannya terdapat pada orientasi dasar dari dua jenis sanksi tersebut sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat indeterminisme sebagai sumber sanksi pidana dan filsafat determinisme sebagai sumber sanksi tindakan. Asumsi dasar filsafat indeterminisme adalah sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika melakukan kejahatan. Konsekuensinya bebas merupakan pilihan, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan pelaku¹⁶.

¹⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Poitik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 88.

¹⁵Sudarto, **Hukum Pidana**, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm 7.

¹⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.* Hlm. 89

Perbedaan ide dasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seperti tersebut di atas, dapat pula ditemukan dalam teori-teori pemidanaan. Substansi teori absolute dan teori relative sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan. Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan dari kesalahan yang telah dilakukan. Teori retribusi mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau (backward looking), yakni memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Menurut teori ini, pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kerugian yang sudah diakibatkan, demi alasan itu pemidanaan dibenarkan secara moral¹⁷.

D. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Tindakan Dalam Undang Undang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan

¹⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah.,Op.cit Hlm. 90-91

- d. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya
- e. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
- f. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
- g. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan¹⁸.

Ditinjau dari pendapat di atas perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Dalam asas peradilan pidana anak menurut Undang – Undang No. 11 tahun 2012 perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak

¹⁸Leden Marpaung, **Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak¹⁹.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;

¹⁹ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, **Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.83

d. pembinaan dalam lembaga;

e. penjara.

Perbedaan Anak Berhadapan Hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua atau wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin

yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Berdasarkan rumusan yang ada maka delik strafbaar feit memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia ,
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan²⁰.

E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual

Pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual secara umum diatur juga dalam Pasal 287 ayat (1), Pasal 291, dan Pasal 292 KUHP yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 287 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan diluar hubungan pernikahan sedang diketahuinya atau patut diduga bahwa perempuan tersebut belum berumur lima belas tahun atau belum dewasa atau belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pasal 291 KUHP:

“Apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun.”

Pasal 292 KUHP

²⁰Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana**, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2012, hlm 48.

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Bila dicermati, pengaturan mengenai hukum kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP di atas ternyata tidak secara khusus membahas kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, kualifikasi perbuatan yang diatur juga tidak lagi relevan dengan faktual yang di alami para korban kekerasan seksual dewasa ini. Artinya, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang dapat disesuaikan dengan ragam kebutuhan hukum guna melindungi korban kekerasan seksual saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pada Pasal 81 dan Pasal 82, yang mana dapat diuraikan di bawah ini :

Pasal 81:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pasal 82:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).”

Meskipun dalam undang-undang tersebut telah dibahas secara khusus mengenai peristiwa kekerasan seksual terhadap anak, namun penulis memandang bahwa hukuman berupa penjara dan denda belum bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 juga memuat beberapa pidana tambahan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dapat ditemukan dalam Pasal 81 ayat (6) berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik. Selain itu dalam Pasal 81 ayat (7) terdapat juga pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang mana disertai pula dengan rehabilitasi. Tetapi pidana tambahan ini dikecualikan apabila pelaku kejahatan seksual tersebut ternyata masih dalam kualifikasi anak-anak. Jangka waktu hukuman pidana tambahan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) di atas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu, Pasal 82A menjelaskan bahwa pelaksanaannya tetap dalam pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, hukum, dan kesehatan. Berdasarkan uraian dari perbandingan sanksi pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 di atas, jelas terdapat perbedaan yang signifikan. Penulis melihat bahwa sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 telah jauh lebih berat jika dibandingkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, serta cukup mewakili rasa keadilan bagi korban. Contohnya dalam kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mengalami gangguan jiwa, luka berat, terganggu

atau hilangnya fungsi reproduksi, penyakit menular, dan/atau korban meninggal dunia pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup, hingga pidana mati, serta ditambah dengan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku kepada publik, kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

F. Tinjauan Umum Tentang Teori Pidanaan

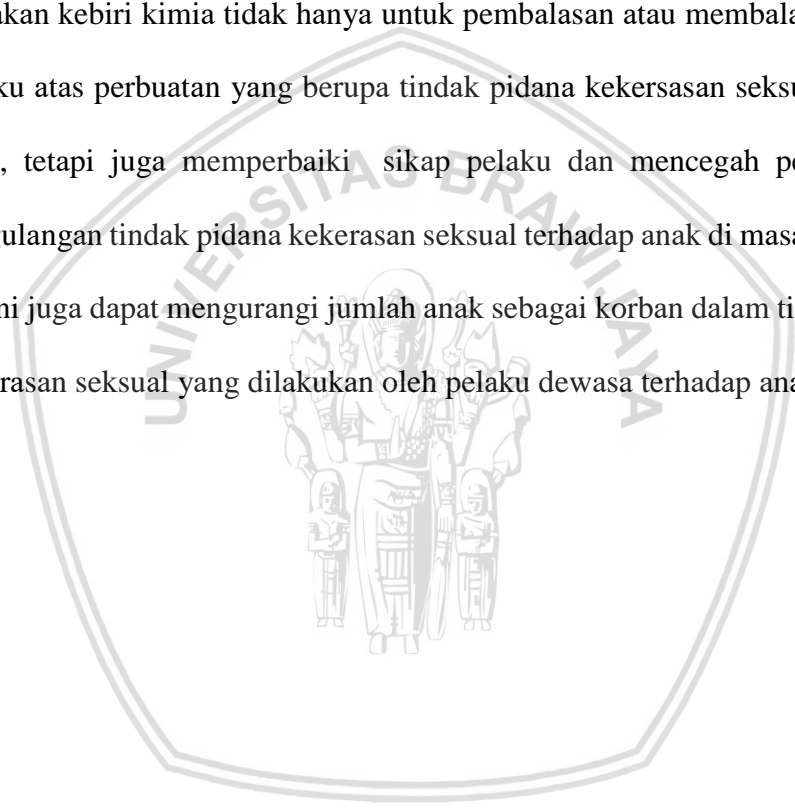
Menurut teori tujuan pidanaan ada 3 yaitu ²¹ :

1. Teori Absolut yaitu teori tentang pembalasan atau penjeratan, teori ini bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku yang dilakukan kepada korban dengan setimpal atau lebih dari yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
2. Teori Relatif yaitu teori tentang perbaikan pada pelaku atau upaya dalam pencegahan, dalam teori ini bertujuan untuk memperbaiki sikap pelaku dan juga melakukan suatu pencegahan agar tidak terulang kembali tindak pidana yang pernah dilakukan untuk masa depan.
3. Teori Gabungan yaitu teori tujuan pidanaan yaitu menggabungkan sebuah teori tujuan pidanaan absolut dengan teori tujuan pidanaan relative sehingga tergabung antara teori tujuan pidanaan untuk pembalasan atau membalas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dan juga memperbaiki sikap pelaku menjadi lebih baik serta mencegah

²¹Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 23.

terjadinya pelaku melakukan perbuatan berupa pengulangan tindak pidana di masa depan.

Dalam hal ini, sanksi yang berupa tindakan pemberian kebiri kimia menggunakan teori tujuan pembedanaan yaitu teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan pada pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang yang berlaku serta menjadi putusan hakim dan pemberian tindakan kebiri kimia tidak hanya untuk pembalasan atau membalas perbuatan pelaku atas perbuatan yang berupa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi juga memperbaiki sikap pelaku dan mencegah pelaku untuk pengulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di masa depan, dan hal ini juga dapat mengurangi jumlah anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dewasa terhadap anak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan guna mencapai suatu tujuan, akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi yang berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya alur yang runtut dan baik untuk mencapai suatu maksud.¹ Menurut Peter R. Senn,² metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Sedangkan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Metode penelitian adalah hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran tersebut bukanlah kebenaran secara religious dan metafisis, melainkan dari segi epistemologi, yang artinya kebenaran yang dilihat dari teori atau diskursus ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kebenaran yang harus diperoleh dari penelitian hukum ini adalah kebenaran koherensi. Dalam hal ini bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Sehingga nantinya dari penelitian hukum ini dapat ditemukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, ataupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari

¹ Winarno Soerakhmat, **Dasar dan Teknik Research**, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 131

² Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 46

metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini karena nilai, mutu, dan validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Terkait hal itu diperlukan suatu metode yang sistematis dan terarah guna memperoleh hasil yang sesuai dengan prosedur yang benar. Oleh karena itu, maka dalam penulisan karya ilmiah berupa laporan penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan laporan penelitian ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas permasalahan pokok atau isu hukum dan konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam laporan penelitian ini.⁵

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35

⁴ Johny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2008, hlm. 295.

⁵ *Ibid*, hlm. 32.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Menurut Johny Ibrahim, nilai ilmiah dari pembahasan serta pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan.⁶

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai hal mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan⁷ dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis mengenai Pasal 81 ayat (7) pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengenai pemberian alat pendeteksi elektronik sebagai sanksi tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dijadikan sebagai Perubahan Kedua dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini untuk mengurangi atau untuk

⁶ *Ibid*, hlm. 299.

⁷ Peter Marzuki, *Op.cit*, hlm. 133.

mengatasi kekerasan seksual terhadap anak yang semakin banyak terjadi dan memakan anak sebagai korban, dan mempengaruhi masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya⁸ Adapun sumber bahan hukum yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim⁹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- b. Pasal 59 ayat (1) Angka 15, dan Pasal 69A mengenai perlindungan anak, dan Pasal 76D, 76E tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 141.

⁹ *Ibid*.

- c. Pasal 81 dan Pasal 81 A, mengenai ketentuan pemberian pidana pokok dan pemberian tindakan sanksi pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi kamus-kamus hukum, buku teks, dan jurnal-jurnal hukum sehingga dapat mendukung, membantu melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam laporan penelitian ini.

Pada penulisan laporan penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, doktrin, pendapat ahli, dan artikel tentang hukum yang diakses dari internet yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Kegunaan bahan hukum sekunder ini adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.¹⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ *Ibid.*

dan Kamus Bahasa Inggris selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang dilakukan.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Teknik penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan cara *library research* yaitu suatu cara memperoleh bahan hukum dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari undang-undang dalam bentuk buku atau dokumen yang dimiliki oleh penulis maupun yang diperoleh dari penelusuran internet.

2. Bahan Hukum Sekunder

Teknik penelusuran bahan hukum sekunder sama dengan teknik penelusuran yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yaitu dengan cara melakukan *library research* yaitu melalui penelusuran buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya yang terdapat di perpustakaan dengan meminjam atau membaca langsung di perpustakaan tersebut, yang dibeli atau dimiliki sendiri oleh penulis, serta yang diperoleh dari penelusuran melalui internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Teknik yang digunakan dalam penelusuran bahan hukum tersier ini adalah dengan melakukan penelusuran kamus berupa KBBI dan kamus Bahasa Inggris yang dimiliki oleh penulis.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penulis dalam hal ini memakai teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran atau interpretasi berupa interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah penafsiran menurut tata Bahasa sesuai dengan yang tertera atau tertulis secara eksplisit dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Interpretasi ini digunakan untuk menafsirkan arti kata atau tata bahasanya pada ketentuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 agar lebih jelas dan dimengerti mengenai maksud dari ketentuan tersebut serta ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Sedangkan interpretasi sistematis adalah penafsiran yang dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam peraturan yang sama maupu dengan peraturan yang lain.

F. Definisi Konseptual

1. Alat Pendeteksi Elektronik Kebiri adalah pemasangan alat pendeteksi *chip* yang dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku residivis kekerasan seksual terhadap anak/
2. Kebiri Kimia adalah memberikan obat anti testoteron kepada pelaku, berlaku secara kontemporer artinya tidak secara permanen dan bisa hilang dalam jangka waktu tertentu yang akan menekan hasrat seksual.
3. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, dan juga orang lain yang telah dewasa, berusia diatas 18 tahun yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

4. Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah ancaman, paksaan atau tidak berdayanya seorang anak dalam aktivitas seksual meliputi tekanan, pencabulan dan juga perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa, usianya 5-18 tahun.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Penyimpangan seksual adalah bentuk dorongan dan kepuasan seksual yang diperoleh atau ditunjukkan kepada objek seksual secara tidak lazim¹, disebut tidak lazim karena perilaku menyimpang seksual diikuti oleh fantasi seksual yang diorientasikan pada pencapaian orgasme melalui hubungan di luar hubungan kelamin heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dari partner seks di bawah umur atau hubungan seksual yang secara normatif bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual yang diakui masyarakat secara umum. Hal inilah yang mendasari asumsi, penyimpangan seksual sebagai bentuk penyalahgunaan fitrah kemanusiaan dan bertentangan dengan akal sehat.

¹Masmuri dan Syamsul Kurniawan, **Penyimpangan Seksual : Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam**, volume 101, IAIN, Pontianak, 2016.

Tabel 4.**Macam-Macam Penyimpangan Seksual**

| No | Macam Penyimpangan Seksual | Keterangan |
|----|----------------------------|---|
| 1 | Fetishisme | Perilaku seks menyimpang di mana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan bendabenda mati seperti celana dalam, bh, gaun, dan semacamnya |
| 2 | Homo Seksual | Kelainan di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan pada perempuan disebut lesbian. |
| 3 | Sadomasokisme | Penyimpangan seksual di mana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya. |
| 4 | Masokisme | Kelainan seks di mana seseorang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya. |
| 5 | Voyeurisme | Perilaku menyimpang seksual di mana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip |

| | | |
|----|-------------|--|
| | | orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan sebagainya. |
| 6 | Pedofilia | Orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur |
| 7 | Bestially | Kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain |
| 8 | Incest | Seseorang yang berhubungan seks dengan sesama anggota keluarga (sedarah) |
| 9 | Necrophilia | Kelainan seksual di mana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan mayat. |
| 10 | Zoophilia | Kelainan seksual di mana seseorang merasa terangsang setelah melihat binatang sedang berhubungan seks. |
| 11 | Sodomi | Kelainan seksual di mana seorang laki-laki menyukai hubungan seks melalui dubur pasangannya. |

| | | |
|----|--------------|--|
| 12 | Frotteurisme | Kelainan seksual di mana seseorang laki-laki merasa memperoleh kepuasan seksual dengan jalan menggesekgesekkan alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau umum seperti di bis, kereta, dan sebagainya. |
|----|--------------|--|

Sumber :Data sekunder Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Tabel diatas menunjukan terdapat 12 jenis penyimpangan seksual menurut KPAI, dibedakan menurut sumber data kekerasan yang terjadi pada anak.

Penyimpangan perilaku seksual disebut dengan Pedofilia yang dialami orang dewasa dan dapat dilakukan pada anak, yang merupakan kelainan atau penyimpangan perilaku seksual dengan melakukan hubungan seksual untuk memenuhi dan memuaskan hasratnya dengan cara menyetubuhi anak-anak atau anak yang dibawah umur. Hal ini dilakukan oleh orang dewasa yang berusia 16 tahun keatas terhadap anak-anak yang secara seksual belum matang usianya dibawah 13 tahun. Hampir semua yang mengalami gangguan tersebut adalah seorang pria. Untuk menarik perhatian penderita mempunyai cara tersendiri misalnya bertingkah laku baik dan sangat dermawan, namun ada juga yang berperilaku kasar dan mengancam anak, sehingga anak mengalami rasa

takut dan cemas sehingga anak menuruti permintaan seseorang mengancam dirinya².

Perilaku yang menyimpang dalam hal seksual seperti pedofilia ada tiga macam pengganggu dalam berfantasi, yaitu :

1. Mengganggu situasional mempunyai alur perkembangan dan perhatian seksual yang normal, namun ketika dalam keadaan tertentu seperti stress dapat timbul keinginan seksual pada anak dan setelah melakukan perbuatan tersebut orang dewasa yang mengalami gangguan situasional akan merasa tertekan.
2. Pengganggu menjadi pilihan merupakan kepribadian dan gaya hidup baginya.
3. Permerkosa anak merupakan suatu perbuatan dari dorongan seksual yang bersifat musuh³.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Perilaku menyimpang seksual seperti pedofilia merupakan suatu perilaku yang sangat berbahaya bagi anak yang akan menjadi korban atau merupakan calon korban yang sudah diincar oleh pelaku, karena tidak hanya kerugian fisik yang akan didapatkan oleh anak, namun juga kerugian mental secara psikologis anak. Psikologis anak yang harusnya dijaga dan dilindungi demi menjamin hak asasi manusia seorang anak yang juga berhak

²Fanny Nadia, **Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

³Tristiadi Ardi, **Psikologi Abnormal**, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 165.

mendapatkan kehidupan layak, hidup tenang dan memiliki perasaan damai serta pertumbuhan dengan wajar sehingga dapat mencapai cita-cita dengan baik dan membawa kebaikan pada bangsa dan negara di masa depan.

Kekerasan seksual terhadap anak di Negara Indonesia merupakan fenomena yang mengerikan karena dapat mengakibatkan rusaknya masa depan anak, tidak hanya merusak masa depan anak sendiri, namun merusak masa depan bangsa dan negara karena dalam hal ini anak merupakan generasi penerus bangsa atau tunas bangsa yang harus dijaga dan di bina sesuai dengan usia perkembangan dan untuk menjadikan kehidupan masa depan bangsa dan negara lebih baik. Masa depan suatu bangsa dan negara adalah bergantungnya pada anak-anak yang akan membangun dan akan membuat lebih baik bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Tindak kekerasan seksual menimbulkan trauma bagi korban baik fisik, psikis, dan sosial. Trauma psikis korban berupa berbagai gangguan psikologis. Gangguan psikologis akibat dari kekerasan seksual atau trauma *post sexual abuse*. Kekerasan seksual yang terjadi misalnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa pada anak yang belum cukup umur atau belum dewasa akan berakibat jangka pendek pada kondisi anak pada masa selanjutnya, akibat jangka pendek yang akan terjadi pada anak adalah tidak mampu mempercayai orang lain, mempunyai rasa takut, rasa khawatir, mudah marah serta suka menyendiri⁴.

⁴Tateki Yoga Tursilarini, **Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak**, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Volume 84, Kementerian Sosial, Yogyakarta, 2017

Dalam hal ini anak yang telah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual harus dilindungi secara hukum dengan tegas, adil, dan juga bagi anak yang tujuannya untuk menjaga kondisi psikologis anak pada masa yang akan datang selama anak berkembang kearah dewasa. Yang dimaksud anak sebagai korban dalam hal ini anak yang mengalami penderitaan atau yang menderita, anak mengalami penderitaan fisik dan penderitaan mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yaitu kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa⁵. Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai keadaan darurat karena tidak hanya melukai anak secara fisik namun juga secara psikologis, bahkan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak hingga menyebabkan anak meninggal dunia.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan kejahatan seksual terhadap anak yang telah tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, kejahatan kesusilaan dalam Bab XIV Buku II KUHP diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Tetapi, khusus terhadap kejahatan yang ada kaitannya dengan hubungan seks yang dikategorikan dalam hukum pidana sebagai kejahatan.

Namun tidak diatur secara spesifik atau tidak diatur secara khusus, sehingga terdapat peraturan yang mengatur lebih khusus lagi mengenai perlindungan anak yang tercantum pada Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan Asas Perundang-

⁵ Siswanto Sunarso, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 241

Undangan yaitu *Lex Specialis derogat Legi Generliti* yang artinya adalah bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum bersifat umum, sehingga dalam hal ini artinya bahwa Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang bersifat khusus mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum.

Pada Pasal 64 ayat (1) “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”,

Disebutkan tentang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Yang dinamakan perbuatan berlanjut, yaitu ada beberapa perbuatan tetapi antaraperbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Bentuk perbuatan berlanjut ini terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyasatu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

Paradigma perubahan UU Perlindungan Anak, dalam hal ini anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan kehidupan. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan maupun sosial. Dalam hal menjamin

seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni UU Perlindungan Anak, namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengah masyarakat salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak. Sehingga, berdasarkan pradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku kurang lebih 2 tahun dan perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah kongkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak terutama pelaku kejahatan seksual diperiksa dipersidangan, pelaku pada saat dahulu mengalami kejahatan seksual sewaktu berusia anak-anak.

Dasar filosofi dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-

Undang yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak adalah dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, maka Pemerintah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan represif dengan memberikan tindakan sanksi berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini diberlakukan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi tindakan pidana yang diatur adalah berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada *Voice of America* (VOA) mengatakan bahwa, pemerintah Indonesia ingin memberikan

perlindungan kepada anak-anak Indonesia agar mereka tidak menjadi korban kejahatan seksual. Banyak negara di dunia ini yang sudah memberlakukan hukuman kebiri atas kejahatan seksual anak. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan Inggris sudah memberlakukan hukuman tersebut sejak tahun 1960, Jerman, Denmark, Rusia, Korea Selatan serta Australia juga telah memberlakukan hukuman tersebut. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia akan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, artinya pelaku bisa saja tidak dihukum kebiri secara permanen. Tetapi bagi pelaku kejahatan tingkat berat, hukuman kebiri dilakukan secara permanen.

Akan tetapi pemberlakuan sanksi pidana (hukuman) kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Diantara pro dan kontra tentang tindakan hukuman tambahan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak tentunya telah melalui serangkaian pertimbangan yang matang. Selanjutnya, hal yang masih perlu dijelaskan dalam pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah persetujuan dari hakim terhadap pelaku kekerasan seksual atas tindakan yang diambil. Pelaku haruslah diinformasikan secara tepat dan menyeluruh atas konsekuensi dan efek dari pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk kemudian memberikan persetujuannya tanpa adanya sedikit pun paksaan akan adanya pengaruh terhadap pembebasan dirinya dari hukuman penjara. sehingga yang terpenting adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh

sebelum dan sesudah pelaksanaan kebiri kimia dan faktor biaya yang cukup besar bagi penyediaan obat-obatan untuk melaksanakan kebiri kimia.

Penerapan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tentunya telah mempertimbangkan aspek perlindungan untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan keputusan hakim pada saat persidangan. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogianya dalam pelaksanaan tindakan yang diberikan kepada pelaku, kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.

Pemerintah perlu memperkuat upaya-upaya pencegahan dan memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual yang berulang, menyiapkan aturan pelaksana teknis pelaksanaan hukuman tambahan, sarana prasarana, sumberdaya manusia baik tenaga kesehatan dan psikolog yang mendampingi pelaku yang akan menjalani prosedur sesuai ketentuan yang sudah berlaku, dan anggaran untuk melaksanakan pemasangan alat pendeteksi elektronik secara berkesinambungan. Pemantauan putusan pengadilan untuk mengawal pelaksanaan tindakan secara pemasangan alat elektronik dengan berkoordinasi antar kementerian yang bertanggungjawab di bidang hukum, sosial, dan kesehatan agar tujuan pemidanaan tersebut menjadi tepat sasaran yakni mencegah kejahatan kekerasan seksual berulang dan membuat efek jera para pelakunya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan pertama kali yaitu menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yang kemudian terdapat perubahan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang berisi tentang Tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sesuai asas *Lex Posteriori derogate Legi Priori* bahwa hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, sehingga telah disahkannya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif, dan perlindungan hukum setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif⁶. Pemerintah, Pemerintah Daerah serta lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak⁷. Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diterima oleh seorang anak dalam

⁶Dr. Putu Dyatmikawa, S.H., M.Hum, **Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2017

⁷Yuliardi Hardjo Putro, 2016, *Kronologi Kasus Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, (online), <http://liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, (03 Mei 2018)

situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan sebuah jaminan rasa aman terhadap ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam pertumbuhan dan berkembangnya seorang anak⁸. Adapun upaya perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yaitu melalui, Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai, agama, dan nilai kesusilaan, Rehabilitasi lingkungan sosial, Pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan anak, Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, sampai dengan tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan⁹

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum¹⁰. Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi

⁸Pasal 59 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014

⁹Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014

¹⁰Nurini Aprilianda, 2016, *Hasil Penelitian Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*

maupun non-materi, dalam hal ini berupa kompensasi, resitusi dan bantuan kepada korban.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana. Saksi adalah alat bukti utama yang telah ditegaskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan (1) Alat bukti yang sah yaitu, sebagai berikut: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa. Urutan tersebut bukan hanya urutan, tetapi juga menggambarkan tingkat kekuatan pembuktian, sehingga saksi merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian utama.

Pada prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, namun hak korban tidak diakomodasikan dalam KUHAP tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi atau korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Nomor 13

Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 UU No. 13 Tahun 2006 dikutip sebagai berikut:Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban, ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk- bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun, mendapatkan penerjemah., bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban, mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus, mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan, mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan, mendapatkan sebuah identitas baru, memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan penasihat hukum untuk korban, memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir, mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Hak-hak korban adalah bagian dari gerakan hak asasi manusia dan harus dilihat sebagai komponen dari agenda hak asasi manusia internasional, karena itu sepenuhnya tepat untuk memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban¹¹. Menurut *Black Law Dictionary*, korban dapat didefinisikan sebagai *a person harmed by a crime, tort, or other wrong*, atau

¹¹Supriyadi Widodo Eddyono, **Penanganan Anak Korban**, volume 7, ICJR, Jakarta, 2016

orang yang dirugikan oleh suatu kejahatan, kesalahan, atau bentuk-bentuk (varian) kesalahan lainnya. Sedangkan menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* definisi korban dijelaskan sebagai orang yang secara individu atau kolektif, yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan nilai substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana (*persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws*). Ilmu Viktimologi mengidentifikasi sedikitnya terdapat enam jenis kebutuhan umum, yang harus diberikan kepada para korban kejahatan. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan informasi, perbaikan, perlindungan, kebutuhan medis dan emosional, serta kebutuhan praktis dan keterbukaan dalam sistem peradilan pidana. Lahirnya beragam kebutuhan untuk para korban tersebut didasari oleh kebutuhan mendasar untuk mendapatkan pengakuan dan validasi atas peristiwa yang dialami korban. Kebutuhan-kebutuhan ini umum dialami baik mereka dari kalangan korban kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang, maupun kejahatan genosida. Keseluruhannya dibedakan oleh tingkat kekerasan dan penderitaan yang dialami, skala korban, dan konteks politik yang dilatarbelakangi. Korban pelanggaran hak asasi manusia tentunya

akan lebih memerlukan sentuhan khusus bila dibandingkan dengan korban kejahatan konvensional.

Dalam kerangka formal yuridis, menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hak-hak korban kejahatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal berikut, yaitu: (1) *access to justice and information*; (2) *reparation*; (3) *compensation from the State*; dan (4) *services*. Selanjutnya, untuk menjawab beberapa hak di atas, negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Memberlakukan undang-undang yang menempatkan prinsip-prinsip dasar keadilan ke dalam undang-undang nasional, serta menerapkan kebijakan dan program untuk memberikan langkah-langkah yang komprehensif bagi korban kejahatan;
2. Menyediakan korban kejahatan dengan informasi yang lebih baik, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara dan peran dalam persidangan pidana;
3. Mendirikan program untuk melindungi korban kejahatan yang rentan karena jenis kelamin atau usia, seperti ruang pelayanan khusus perempuan dan anak di kantor-kantor kepolisian;
4. mempromosikan pencegahan tindakan-tindakan kejahatan, di semua tingkat pemerintahan.

UU tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi kebiri kimia, Pemberian sanksi berupa kebiri kimia adalah sebagai sanksi tambahan demi mencapai sebuah keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk melindungi anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. Pengaturan tindakan berupa kebiri kimia bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak serta mencegah terjadinya pelaku lain dalam tindak pidana yang sama serta memberikan perlindungan terhadap anak yang masih dalam tahap tumbuh dan

berkembang yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa sehingga dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik. Meskipun pada awalnya tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi *pro* dan *kontra* di kalangan masyarakat, peraturan mengenai tindakan kebiri kimia telah sah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sehingga masyarakat harus melaksanakan ketentuan yang telah berlaku tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur adalah 15 tahun penjara, minimal 5 Tahun penjara, denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enampuluh juta rupiah) hingga Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pidana maksimal dalam ketentuan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual tersebut diatas dapat ditafsirkan secara harafiah bahwa ada kemungkinan pelaku kekerasan seksual dihukum lebih rendah dari 15 tahun penjara tergantung tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan hakim. Oleh karena itu, banyak pihak yang menuntut perlunya hukuman tambahan yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual pada anak yang pada akhirnya lahirlah ketentuan mengenai pemberian sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual. Di lain sisi, pemberian hukuman berupa tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Pasal 4 yang mengandung arti bahwa hak untuk tidak disiksa bagi manusia dan hak yang ada dalam pasal tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang artinya adalah

hak dasar yang dimiliki manusia dan bersifat mutlak¹² serta terdapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dijelaskan bahwa setiap orang dari suatu hukuman yang dapat memberikan penyiksaan atau mendapat perlakuan kejam, perlakuan tidak manusiawi sebagai manusia serta merendahkan derajat dan juga martabat sebagai seorang manusia¹³. Untuk hal diatas tersebut dalam perspektif Hak Asasi Manusia, sanksi yang dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Maka dari itu seharusnya, perumusan hukuman atau sanksi seharusnya lebih bersifat manusiawi dan memperhatikan hak-hak asasi manusia.

Peneggakan hukum di Indonesia masih lemah sehingga kejahatan kekerasan seksual masih terus terulang, selain peneggakan hukum juga diperlukan partisipasi masyarakat untuk pencegahan sejak dini. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Komnas HAM yang disampaikan melalui keterangan persnya bahwa Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa sehingga perlu diambil pula langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut¹⁴. Namun Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman dilakukan secara maksimal dengan tetap dilakukan secara manusiawi dan diupayakan

¹²Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999

¹³Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999

¹⁴Nur Kholis, *Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual*, Komnas HAM, 2016.

menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam keadaan kehidupan sosial masyarakat.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dari ketentuan pidana adalah :

a. Unsur Subyektif Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam Pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

b. Unsur Dengan sengaja

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Jadi yang dimaksud

dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, yaitu :

1. Teori kehendak (willstheorie) yang diajarkan oleh Von Hippel, menerangkan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie) dianut oleh Frank, yang menerangkan bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

c. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas

kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Pasal 55 Ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Unsur membujuk pada Pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang ketentuan pidana , hal ini dikarenakan Pasal 55 Ayat 1 ke- 2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang ketentuan pidana hanya untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dalam hal perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat disajikan dalam bentuk edukasi atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, nilai, agama, nilai

kesusilaan, serta rehabilitas dilingkungan sosial anak, untuk memberikan anak ilmu pengetahuan serta menghilangkan rasa trauma yang dialami anak karena peristiwa tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga dapat menjalani kehidupan seperti sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Anak akan didampingi oleh psikososial saat pengobatan atau saat mengalami masa trauma hingga sampai pulih kembali, serta perlindungan anak sebagai korban dilakukan sejak di tingkat pemeriksaan, tingkat penyidikan, dan tingkat penuntutan sampai di sidang pengadilan.

Tindakan kejahatan kekerasan seksual yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 ada 2 macam yaitu tindak pidana persetubuhan terhadap anak Pasal 81 dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak Pasal 82. Macam-macam hukuman yang bisa dikenakan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan meliputi :

1. Pidana pokok berupa penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 milyar, bisa diberi pidana penambahan sepertiga dari ancaman bagi pelaku tertentu yang seharusnya melindungi anak dan kepada residivis. Dan pidana mati, seumur hidup, penjara minimal 10 tahun maksimal 20 tahun bila korbannya lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korbannya meninggal dunia.

2. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, serta
3. Sanksi tindakan pemasangan pendeteksi elektronik.

Sedangkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak meliputi :

1. pidana pokok berupa pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, denda 5 milyar rupiah dan diberikan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk pelaku tertentu.
2. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku
3. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Dalam pembahasan diatas menunjukkan bahwa hukuman mati serta pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual tidak efektif untuk menimbulkan efek jera dan tindakan ini dipandang tidak menysasar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku. Tidak ada bukti yang menjamin bahwa setelah pemasangan alat pendeteksi elektronik tersebut telah mengurangi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seiring dengan peradaban HAM, pemasangan alat pendeteksi elektronik diterapkan hanya untuk pelaku residivis sehingga dapat mengetahui pergerakan pelaku jika sudah di pasang sehingga pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus

disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimana pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis.

Melihat karakteristik perbuatan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Secara yuridis pihak yang dituntut bertanggung jawab adalah eksploitatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat kekerasan seksual adalah dengan KUHP Pasal 292 Jo. Pasal 64 tentang pencabulan. Tuntutan maksimal 5 tahun penjara dipandang Komnas Anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta mengandung kelemahan yang diatur hanya orang dewasa membujuk anak. Selain itu dalam Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara, namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentunya menjadi titik lemah dalam KUHP karena pada kenyataannya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu.

Pasal-Pasal tersebut nyatanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak dan maraknya kasus kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak. Pidana yang berlaku dari tahun ketahun tidak mengalami perubahan. Hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada karena pidana yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karenanya perlu adanya suatu upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan agar bisa mengurangi

bahkan tidak terjadi lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukuman kebiri sebagai hukuman bagi pelaku.

Adapun yang termasuk dalam pidana tambahan dalam Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu, “selain dikenai pidana tambahan dimaksud ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku”. Pidana tambahan jenis ini dapat dikenakan kepada jenis pelakunya sebagai pelaku biasa, pelaku yang dekat dengan anak, pelaku residivis dan karena akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga dimungkinkan pelaku pedofilia terutama residivis dan petindak yang berdasarkan akibat perbuatannya terjatuh dalam pidana pemberatan, terjatuh pula dengan pidana tambahan, dan terjatuh lagi dengan pidana tindakan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memungkinkan dikenakan hukuman tindakan berupa kebiri kimia, hanyalah tindak pidana yang tergolong sebagai persetubuhan. Pasal 81 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2016 berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”. Terlihat jelas bahwa Pasal tersebut merujuk kembali ke Pasal 76 D Undang-Undang No. 23 Tahun

2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain”. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Terlihat jelas juga Pasal tersebut merujuk ke Pasal 76 E Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pengaturan tentang sanksi tindakan kebiri yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai berikut :

Pasal 81 ayat 7¹⁵ :

“ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. ”

Catatan : pada ayat (4) mengatur tentang pelaku yang pernah dipidana atau residivis karena melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau

¹⁵Pasal 81 ayat 7 UU No.17 Tahun 2016

orang lain, sedangkan ayat (5) mengatur hal tindak pidana yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, dan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Pasal 81 ayat 8¹⁶ :

”Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan:”

Pasal 81 ayat 9¹⁷ :

“Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak”

Pasal 81 A¹⁸ :

“(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 7 dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2(dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok:”

“(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan.”

“(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.”

¹⁶Pasal 81 ayat 8 UU No.17 Tahun 2016

¹⁷Pasal 81 ayat 9 UU No.17 Tahun 2016

¹⁸Pasal 81A ayat 1,2,3 UU No. 17 Tahun 2016

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian bisa dibuat beberapa hal yang merupakan catatan penting terhadap pemasangan alat pendeteksi elektronik adalah sebagai berikut¹⁹ :

1. Bahwa pemasangan alat pendeteksi elektronik hanya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana seksual dalam Pasal 81 ayat 7 yaitu tindak pidana persetubuhan dengan anak dengan syarat khusus, yaitu apabila pelakunya residivis atau korbannya lebih dari satu, luka berat, mengalami gangguan jiwa, menderita penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau meninggal dunia. Tidak dapat dikenakan untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur didalam Pasal 82.
2. Jangka waktu pemasangan alat pendeteksi elektronik dibatas hanya 2(dua) tahun, dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Bukan pada saat atau selama terpidana menjalani pidana, jika ada saat ini sudah ada hakim yang menjatuhkan vonis hukuman kebiri, maka baru tindakan pengebirian baru akan bisa dilaksanakan 5 tahun kedepan karena ancaman pidana untuk tindak pidana ini adalah minimal 5 tahun penjara.

¹⁹Endang Yuliana dan Tri Wahyu, **Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil**, volume 145, FHUNSRI, Surakarta, 2017.

3. Pelaksanaan sanksi kebiri diawasi oleh 3 kementerian yaitu bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
4. Pelaksanaan pemasangan alat pendeteksi elektronik disertai rehabilitasi

Pada hakikatnya antara pidana pokok, pidana tambahan dan pidana tindakan perbedaannya dapat dilihat melalui gradasi pidananya²⁰. Pidana pokok merupakan pidana paling terberat dengan tujuan memberikan efek jera, seperti perampasan hak dasar berupa hak hidup (pidana mati), hak kebebasan (pidana penjara), dan hak milik (pidana denda). Sementara pidana tambahan yang tujuannya bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, gradasi hukumnya lebih ringan dari hukuman pidana pokok, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara, tidak sampai menanggukuhkan hak yang sifatnya kodrati. Pidana tambahan dalam Pasal 10 huruf (b) KUHP bisa menjadi contoh di antaranya yaitupencabutan hak-hak tertentu (hak politik, hak perwalian), perampasan barangbarang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Berbeda dengan pidana tindakan yang berpijak dari filosofi pemidanaan perawatan dan pemulihan terhadap pelaku kejahatan, sehingga tingkat pemidanaannya lebih ringan dari pidana tambahan. Pidana tindakan biasanya pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran melalui lembaga pembinaan pemerintah.

²⁰Aditia Arief Firmanto, **Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**, volume 9, FHMalahayati, Bandar Lampung, 2017.

UU Nomor 17 Tahun 2016 menempatkan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang mana, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi sebagai sanksi tindakan pelaksanaan secara kumulatif penting bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mensyaratkan tindakan kebiri kimia sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 ayat (7) pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pengulangan *residivis* dapat dikenakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik namun untuk jangka waktu paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yang bisa berdiri sendiri sebagai pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pelaksanaan disertai dengan rehabilitasi. Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP “seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap “.Alternatif Pemidanaan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual berulang adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku melalui putusan hakim yang bertujuan untuk menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri *restorative justice* yang berdasarkan *treatment* (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia. Rehabilitasi sebagai *treatment* pemidanaan bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak berulang sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan sehingga sangatlah tepat untuk di gunakan daripada sanksi

kebiri. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa penerapan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan seksual berulang berdasarkan tujuan treatment lebih diarahkan pelaku sebagai orang yang sakit mentalnya. Alternatif pemidanaan rehabilitasi ini ditujukan untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan. Menurut Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng Mohammad Faqih mengatakan, pemasangan alat pendeteksi sebaiknya dilakukan dalam prepektif rehabilitasi. Jika tujuannya rehabilitasi hasilnya akan lebih efektif serta dilakukan dalam prespektif kepada pemasangan alat pendeteksi elektronik belum diketahuinya cara kerjanya dan anggaran biaya besar untuk teknologi dan operatornya²¹. Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik dalam prespektif rehabilitasi pelaku seksual akan bisa sembuh karena *output* dari rehabilitasi memang untuk kesembuhan, jika prespektifnya hanya hukuman pelaku tidak akan bisa sembuh. Penghukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertai pada hukuman pokok, dalam perbedaannya pidana pokok dan pidana tambahan adalah Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah (pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan) sedangkan Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan atau tidak). Hal ini dikecualikan

²¹Rakhmat Nur Hakim, 2016, *IDI: Jika Kebiri Kimia Dilakukan Dalam Prespektif Rehabilitasi*, (online), <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> (23 Juli 2018)

terhadap kejahatan tersebut dalam ketentuan pasal 250 , 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Hukuman tambahan bermaksud memberikan penderitaan kepada pelaku, namun hukumannya lebih ringan, sebab lazimnya hanya merampas hak yang terkait dengan kepentingan negara. Tidak sampai menanggihkan hak yang sifatnya adikodrati. Berbeda dengan hukuman pokok yang merupakan hukuman yang paling terberat dengan tujuan meberikan efek jera, dimana terjadi perampasan hak dasar berupa hak hidup (hukuman mati), hak kebebasan (hukuman penjara), hak milik (denda).

B. Pengaturan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Yang Tepat Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Masa Yang Akan Datang.

Konteks pemasangan alat pendeteksi elektronik, baik dari gradasi pidananya maupun metode pembedaannya harus didapati bahwa pidana pokok telah menyimpangi prinsip pembedanaan. Pembedanaan ini tiada lain sebagai perampasan hak fundamental berupa hak untuk berkeluarga serta bertentangan dengan filosofi pidana tindakan yaitu pelaku hanya diberikan pendidikan dan pengajaran, bukan pidana badan. Maka dengan itu lebih tepat pidana kebiri dikualifikasikan sebagai pidana pokok saja. Apabila pemasangan alat pendeteksi elektronik ditempatkan sebagai pidana tindakan, lalu diakumulasikan dengan pidana pokok, maka sama saja mengacau-balaukan filosofi pembedanaan antara bermaksud memberi efek jera. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa terhadap pemasangan alat pendeteksi elektronik bukanlah satu-satunya alternatif pembedanaan yang

efektif untuk diberlakukan di Indonesia bagi pelaku kejahatan seksual, dalam hal ini pelaku kekerasan seksual yang juga seorang manusia sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hukuman tersebut menimbulkan, apakah alternatif pemidanaan yang dapat menjawab permasalahan mengenai pelaku kejahatan seksual yang tentunya humanis, sesuai prinsip pemidanaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia yang mampu memberikan jalan keluar terbaik, yaitu pemidanaan yang efektif adalah yang membuat pelaku jera dan sanggup mengembalikan pelaku kejahatan seksual yang bersangkutan kembali ke masyarakat menjadi manusia normal dan dapat berinteraksi sosial dengan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, selaras, serasi dan adiluhur sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Terkait dengan di atas pidana pokok pemidanaan di Indonesia dalam teori pemidanaan menurut penulis adalah relevan menjadi alternatif pidana terakhir bagi pelaku kejahatan seksual. Untuk membuat tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik ini lebih efektif, lebih baik jika ditambahkan dengan sebuah terapi yang merubah perilaku kekerasannya dan perilaku seksualnya. Ini sejalan dengan konsepsi tujuan pemidanaan dari teori gabungan yang menyatakan bahwa selain menerapkan unsur pembalasan tetapi juga untuk memperbaiki pelaku pedofilia agar tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam teori gabungan konsepsi pemidanaan perlu adanya pemilahan antara tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana dalam undang-undang proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana. Pada setiap tahap perlu ada asas-

asas tertentu yang diprioritaskan. Jaksa di dalam mengemukakan tuntutan pidana misalnya dalam tindak pidana kategori berat dapat mengutamakan unsur pembalasan. Pada tahap pelaksanaan pidana perlu pula memperhatikan resosialisasi terpidana

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 kelompok teori, yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat Justitia Ruat coelum” (Walaupun besok dunia akan kiamat penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral atau etika. Pengamat lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yakni Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pelaku pembuat kejahatan harus dipidana dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. Teori ini mendasarkan pandangan

kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan dalam hukum pidana yakni pencegahan, pencegahan bukan tujuan akhir hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat.

Teori Pembinaan lebih diutamakan kepada pelaku tindak pidana, yang tidak didasarkan pada suatu hukuman perbuatan berat atau ringannya tindak pidana yang telah dilakukan. Hanya harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan dan diperbaiki oleh pelaku, teori ini dalam tujuan pidana adalah untuk merubah tingkah laku serta kepribadian pelaku tindak pidana untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk dan bertentangan dengan aturan norma hukum lain sehingga pelaku tindak pidana mematuhi norma yang berlaku, dalam hal teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dan ditegaskan pula dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenaan merendahkan martabat manusia, tujuan pembedaan akan dikonkritkan dalam bentuk pedoman pembedaan yang akan dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik, aliran modern, aliran neoklasik. Aliran klasik menitik beratkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang merupakan hukum pidana perbuatan *daadstrafrecht*. Aliran modern perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut pandang yuridis yang terlepas dari orang yang melakukannya dan tetapi

harus dilihat secara konkritnya bahwa dalam kenyataan perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya.

Aliran neoklasik yakni pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik yang terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan, dalam aliran neoklasik mulai dipertimbangkannya kebutuhan adanya suatu pembinaan individual dari pelaku perbuatan pidana. Di dalam draft naskah akademis RUU KHUP yang disusun oleh Tim pada tahun 2010²² yang dijelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mendasarkan diri pada pemikiran aliran neoklasik yang menjaga suatu keseimbangan antara faktor obyektif suatu perbuatan dan faktor subyektif sikap batin, pada aliran ini berkembang pada Abad ke 19 yang dipusatkan perhatiannya yang tidak hanya pada perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi, dan tetapi juga terhadap aspek-aspek individual pada pelaku tindak pidana. Pemikiran yang mendasar lainnya yang mempengaruhi penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yakni merupakan perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan yang berkembang setelah Perang Dunia II yang telah menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini antara lain tercermin dari berbagai pengaturan tentang tujuan pemidanaan dalam syarat pemidanaan, pasangan sanksi berupa pidana dan tindakan, pengembangan alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek, pedoman atau aturan pemidanaan, pidana mati bersyarat dan

²² Draft Naskah Akademik RUU KUHP, 2010, hlm 92-96

pengaturan batas minimum umum suatu pertanggungjawaban pidana, pidana serta tindakan bagi anak.

Ide keseimbangan antara faktor obyektif dan faktor subyektif juga terlihat dalam penentuan sumber utama hukum pidana. Sumber utama untuk menentukan tindak pidana adalah UU, yang artinya tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah yang tertuang didalam UU, akan tetapi dengan tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat atau sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat. Dalam ide keseimbangan ini yakni merupakan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Dari beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa pembedaan harus memberi kepuasan bagi hakim, korban maupun pelaku sendiri. Dalam hal pidanatambahan berupa kebiri ini akankah mampu memberi rasa keadilan bagi pelaku sebagai pihak yang akan menerima hukuman tambahan berupa kebiri. Menurut penulis teori yang tepat untuk pelaku kejahatan pedofilia berulang adalah dengan teori tujuan, yaitu tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tujuan penjeraan yang melandasi keluarnya undang-undang kebiri tidak menysar akar masalah timbulnya kejahatan seksual pada anak, yakni keinginan untuk mendominasi dan menundukkan anak dan perempuan melalui manifestasi instrumen. Dengan kata lain, pola pikir yang mempengaruhi hasrat seksual tidak teratasi dengan penerapan hukuman kebiri kepada pelaku. Sedang permasalahan lainnya juga tidak memperhatikan aspek *cost benefit analysis*, karena hukuman kebiri ini juga

memiliki dampak secara ekonomi, sebab harus menyiapkan anggaran untuk menerapkannya.

Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual yaitu dengan memperberat sanksi pidana pokok bagi pelaku kejahatan seksual dan juga menyertakan pidana tambahan bagi pelaku residivis kejahatan seksual yaitu salah satunya dengan mencantumkan hukum kebiri sebagai hukuman pelaku kejahatan seksual berulang. Dengan upaya ini diharapkan agar pelaku berpikir ulang untuk melakukan kejahatan seksual sehingga mampu mencegah dan mengurangi kasus Kejahatan seksual tersebut sesuai dengan teori-teori pemidanaan di mana tujuan pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan adalah untuk menjerakan pelaku, mengembalikan pelaku menjadi manusia yang lebih baik setelah kembali kemasyarakat sehingga mampu mencegah terjadinya kasus kasus serupa.

Dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, pelaku yang dengan cara tipu muslihat, membohongi, membujuk dan melakukan ancaman dan kekerasan memaksa anak bersetubuh atau sesuai dengan Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelaku pidana dipidana penjara 5 tahun dan 15 tahun dan denda Rp 5 Miliar. Pada ayat 3 menyebutkan, jika hal itu dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan lebih dari satu orang atau secara bersama-sama, pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana, seperti dituangkan pada ayat 1. Pada ayat berikutnya,

hukuman yang sama juga dikenakan terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya. Namun, pada ayat 5 dalam hal adanya ancaman dan kekerasan seksual terhadap anak yang menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup atau dipidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.

Khusus pelaku yang memenuhi ayat 1,3,4 dan 5 pelaku dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas kepublik, adapun terhadap pelaku yang mengulang kembali perbuatannya dan mengakibatkan korban luka berat, gangguan jiwa, terkena penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi atau meninggal dunia. UU memberikan tindakan tambahan dalam bentuk kebiri secara kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan ini diputuskan secara bersama-sama pidana pokoknya dengan memuat jangka waktu pelaksanaan penindakan. Meski demikian, UU mengecualikan pidana dan tindakan tambahan bagi pelaku anak. Tindakan kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian terkait. Sementara pelaksanaan kebiri kimia akan disertai dengan rehabilitasi. Namun pada pidana tambahan ini dikecualikan jika pelaku kejahatan seksual tersebut ternyata masih dalam kualifikasi anak – anak.

Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual

pada anak itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Pidana tambahan tersebut dipandang tidak menysar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Kebiri kimia apabila dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual hanya akan menghentikan hasrat nafsu pelaku ketika menjalani hukuman saja, apabila sudah selesai menjalani masa hukuman tak ada jaminan bahwa pelaku tidak melakukan perbuatannya lagi. Pengumuman identitas pelaku juga dirasa tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, dimana apabila seseorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang disebarkan ke publik identitasnya terancam mengalami pengucilan dari masyarakat, padahal jelas-jelas seseorang yang dipidana diharapkan dapat berbaur kembali dengan masyarakat setelah ia menjalani hukuman. Tidak berbeda dengan pendeteksi elektronik yang nantinya berfungsi untuk melacak keberadaan mantan pelaku kekerasan seksual, dengan cip yang dipasangkan padanya membuat dirinya tidak memiliki kebebasan untuk bepergian dan melakukan aktifitas sebab apapun yang sedang ia lakukan, ia sedang di monitori oleh aparat penegak hukum.

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan. Keadilan mencerminkan

bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Suatu pidana yang dijatuhkan kepada seorang pelaku harus dilihat dari diri pelaku sendiri apakah dianggap sadar atas perbuatannya atau tidak. Jika berpotensi mengulangi lagi perbuatannya pidana tambahan dalam perppu tersebut dirasa adil. Hukuman yang ada saat ini yakni 15 tahun penjara dirasa kurang memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan seksual.

Menurut penulis, pidana tambahan yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tidak memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. pidana tambahan pengumuman identitas pelaku hanya akan memberikan beban psikis karena menimbulkan efek malu dan tekanan yang luar biasa, bukan hanya pada pelaku tapi juga keluarga pelaku. Lalu kebiri kimia, penulis menganggap bahwa pidana tersebut hanya akan menyakiti pelaku, dan bisa berakibat pelaku tidak bisa memiliki keturunan nantinya. Hal tersebut juga memiliki dampak bagi keluarga korban. Dan yang terakhir pemasangan alat pendeteksi elektronik hanya akan membatasi aktifitas pelaku dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, yang terutama dari Bab I hingga Bab IV tentang analisis yuridis alat pendeteksi elektronik sebagai sanksi tindakan yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, pada akhirnya penulis sampaikan kesimpulan serta saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Sanksi Pidana terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak ditinjau dari Undang-undang Nomor Tahun 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Noor 23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak, yang terdapat di dalam Pasal 81 serta pasal 81 A, merupakan dasar tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dapat diberlakukan bersama-sama dengan pidana pokok, yang mana pemasangan alat pendeteksi ini tidak sesuai karena belum diketahuinya cara kerjanya dan anggaran biaya besar untuk teknologi dan operatornya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tindakan tersebut dapat diterapkan bagi dan pelaku residivis yang hukumannya di pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

2. Pengaturan alat pendeteksi sebagai sanksi tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual kepada anak di Indonesia yang mencerminkan hak asasi manusia terhadap anak di masa yang akan mendatang dengan menggunakan hasil beberapa penelitian yang penulis teliti, Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan tindakan ini dipandang tidak menysar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku.

B. Saran

1. Hal ini saran untuk pemerintah adalah untuk mempertegas kebijakan dalam UU Nomor 17 Tahun 2016. Serta pemerintah untuk mengkaji ulang UU Nomor 17 Tahun 2016 sebab masih terdapat beberapa hal yang belum dibuat aturannya seperti tata cara pelaksanaan ketiga pidana tambahan yang terdapat dalam perppu tersebut.
2. Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pernah dipidana dengan tindak pidana yang sama dan menimbulkan dampak serius sebagai mana pada pasal 81 ayat (5) UU Nomor 17 Tahun 2016. Sebaiknya bentuk pembedaan yang digunakan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pelaku pedofilia diberikan hukuman mati saja tanpa dilakukan pemberian tindakan hukuman kebiri kimia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 46

C.S.T. Kansil, S.H, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 110

Depkes RI, **Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan**, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 78.

Dr.Maidin Gultom, SH.,M.Hum, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama,Bandung, 2010, hlm.33

Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 23.

Hadi Supeno, **Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 41.

Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak : Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia**,Nuansa,Jakarta 2008,Hlm 35.

Ismantoro Dwi Yuwono, **Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

Leden Marpaung, **Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

Mahrus Ali SH.,MH, **Dasar Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta,2010,hlm 251.

M.Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Di Hukum**,Sinar Grafika,Jakarta,2013,hlm 9.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999, hlm 29.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988, hlm. 13-14.

Siswanto Sunarso, **Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 241

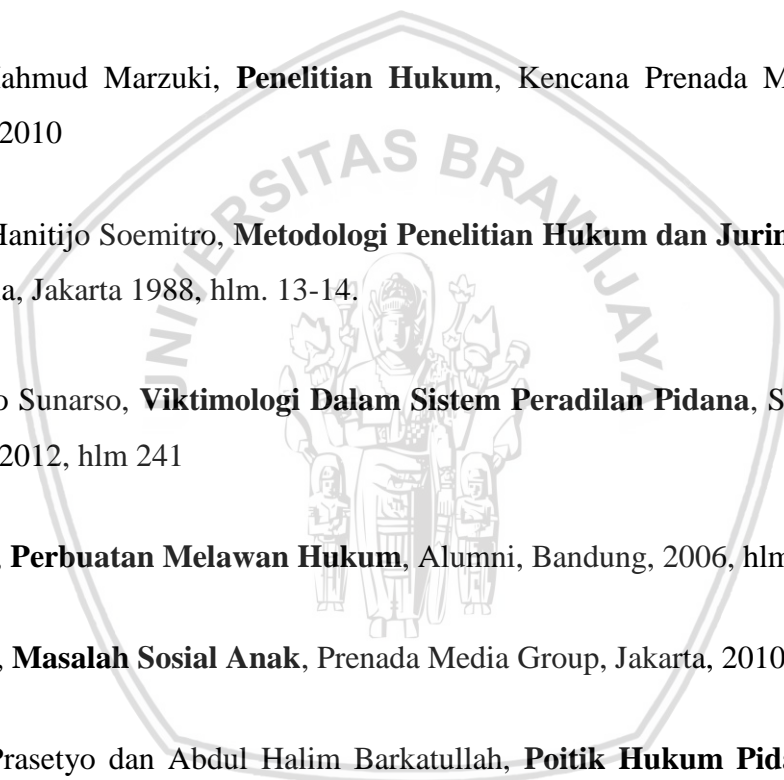
Soeroso, **Perbuatan Melawan Hukum**, Alumni, Bandung, 2006, hlm 49.

Suyanto, **Masalah Sosial Anak**, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm 24.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, **Poitik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 88.

Tristiadi Ardi, **Psikologi Abnormal**, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 165.

Wahid, dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**,Refika Aditama, Bandung, 2007,Hlm 41.



repository.ub.ac.id

Winarno Soerakhmat, **Dasar dan Teknik *Research***, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 131

W.J.S. Poerwadarminta, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hlm 345.

JURNAL

Aditia Arief Firmanto, **Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**, volume 9, FHMalahayati, Bandar Lampung, 2017.

Dr. Putu Dyatmikawa, S.H., M.Hum, **Perbuatan Berlanjut Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra, 2017

Endang Yuliana dan Tri Wahyu, **Hukuman Kebiri Sebagai Ancaman Penjeraan Bagi Pedofil**, volume 145, FHUNSRI, Surakarta, 2017.

Masmuri dan Syamsul Kurniawan, **Penyimpangan Seksual : Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam**, volume 101, IAIN, Pontianak, 2016.

Nur Kholis, **Pandangan Komnas HAM Mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual**, Komnas HAM, 2016.

Sudarto, **Hukum Pidana**, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1973, hlm 7

Supriyadi Widodo Eddyono, **Penanganan Anak Korban**, volume 7, ICJR, Jakarta, 2016

Tateki Yoga Tursilarini, **Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak**, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Volume 84, Kementerian Sosial, Yogyakarta, 2017

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UNDANG-UNDANG

Draft Naskah Akademik RUU KUHP, 2010, hlm 92-96

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

SKRIPSI

Fanny Nadia, **Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia**, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.

MAKALAH

Nurini Aprilianda, 2016, *Hasil Penelitian Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*

INTERNET

Aditya Budiman, 2016, *Presiden Jokowi Teken Perpu Kebiri* (online), <http://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/0603774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri> (20 Maret 2018)

Dedi Hendrian, 2016, *KPAI : Pelecehan Seksual Pada Anak Meningkat 100%* (online), <http://kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/>, (20 Maret 2018)

Karnia Septia, 2016, *Cabuli 5 Anak Dibawah Umur, Residivis Kasus Paedofil* (online), <https://regional.kompas.com/read/2016/02/24/12592311/Cabuli.5.Anak.di.Bawah.Umur.Residivis.Kasus.Paedofilia.Kembali.Dibekuk> (20 Maret 2018)

Kemenpppa, 2017, **Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak** (Online), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/30/1260/data-pengaduan-komisi-perlindungan-anak>, (19 April 2018)

KPAI, 2017, **Bank Data Perlindungan Anak** (online), <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2017> (16 Maret 2018)

Nabila Tashandra, 2016, *DPR Sahkah Perppu Kebiri Menjadi Undang Undang* (online), <https://nasional.kompas.com/read/2016/10/12/13333281/dpr.sahkan.perppu.kebiri.menjadi.undang-undang>, (20 Maret 2018)

Nusantaranews, 2016, *Hukuman Kebiri Melanggar Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia* (online), <https://nusantaranews.co/hukuman-kebiri-melanggar-sumpah-dokter-dan-kode-etik-kedokteran-indonesia/>, (22 Maret 2018)

Rakhmat Nur Hakim, 2016, *IDI: Jika Kebiri Kimia Dilakukan Dalam Prespektif Rehabilitasi*, (online), <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/25/19540851/idi.jika.kebiri.kimiawi.dilakukan.dalam.perspektif.rehabilitasi.kami.mau.jadi.eksekutornya> (23 Juli 2018)

Yuliardi Hardjo Putro, 2016, *Kronologi Kasus Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu*, (online), <http://liputan6.com/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>,